

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KELURAHAN KEBUN SARI KECAMATAN AMUNTAI
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Proposal

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Administrasi Publik



OLEH:

GUSTI NURSA AMALIA

NPM : 2022237

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2025**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : GUSTI NURSA AMALIA
NPM : 2022237
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN KEBUN SARI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing 1



Irza Setiawan, S.Sos, M.AP.

NUPTK. 9456765666137023

Pembimbing 2



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A

NUPTK. 2436770671130263

Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A

NIK. 19921042015091021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta beliau hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT. Sehingga saya dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”** dengan baik dan lancar.

Denagan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, M.AP, CIQnR, CIQaR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)Amuntai.
2. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP. selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik dan lancar.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S .Sos., M.A. selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik dan lancar.
4. Bapak Hidayatul Fikri selaku Koordinator PKH Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajarannya.
5. Seluruh dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

6. Orang Tua, dan seluruh Keluarga penulis yang selalu mendukung baik doa, semangat maupun materinya.
7. Seluruh pihak yang terlibat dan masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah yang telah membantu dalam memberikan informasi dan pendapatnya kepada penulis.
8. Serta seluruh pihak yang terkait dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan demi hasil yang maksimal untuk skripsi ini dan skripsi Mahasiswa lain dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Amuntai, September 2025

Penulis,



Gusti Nursa Amalia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Hasil Penelitian Terdahulu	11
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Pelayanan Publik	12
2. Efektivitas	12
3. Konsep Kemiskinan	15
4. Program Keluarga Harapan (PKH)	25
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Tipe Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	35
1. Data	35
2. Sumber Data	36
E. Desain Operasional Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39
2. Wawancara	40
3. Dokumentasi	40
G. Teknik Analisis Data	41
H. Uji Kredibilitas Data	42
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan pokok bagi setiap negara di seluruh dunia. Salah satu rintangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang hampir dialami oleh semua bangsa dan negara di dunia. Fenomena ini sering kali menimpa negara-negara yang kurang maju serta negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang. Dalam hal ini, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas fenomena kemiskinan tersebut? Apakah tanggung jawab itu berada pada negara, khususnya pemerintah, atau pada individu secara pribadi? Pertanyaan ini mungkin telah menjadi bahan perdebatan yang luas di berbagai kalangan, tidak hanya di lingkungan akademis. Namun, peneliti tidak akan memperdalam pembahasan mengenai pertanyaan tersebut, melainkan akan mengacu pada konstitusi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati sejak lama. Dengan demikian, poin utama yang diambil oleh peneliti sebagai jawaban atas pertanyaan di atas adalah bahwa negara bertanggung jawab atas fenomena kemiskinan yang terjadi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembentukan Negara Indonesia dan pemerintahnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, dalam konteks pemahaman ini, masalah kemiskinan

menjadi tanggung jawab negara yang diwakili oleh pemerintah. Adapun kutipan dari UUD 1945 adalah sebagai berikut:

“.....Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....”

Berbicara mengenai kesejahteraan, umumnya tidak terpisah dari masalah kemiskinan, di mana bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam konstitusi, telah lama berupaya melepaskan diri dari belenggu kemiskinan tersebut. Fenomena kemiskinan di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan, baik pada masa kerajaan maupun era kolonial, dan hingga kini bangsa ini belum sepenuhnya terbebas dari cengkeramannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dari satu rezim ke rezim berikutnya untuk mengatasi masalah ini. Fenomena tersebut dapat disamakan dengan penyakit kronis yang sedang dalam proses pengobatan dan masih menjalani berbagai eksperimen penyembuhan. Bahkan, langkah-langkah pemerintah dalam menangani kemiskinan telah didukung oleh berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta peraturan pendukung lainnya. Namun, dalam penerapannya, diperlukan pengujian dan evaluasi yang sistematis, mengingat kenyataan bahwa fenomena kemiskinan masih jelas di sekitar kita.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang diklaim oleh pemerintah sebagai inisiatif unggulan dan merupakan bentuk dari *Conditional Cash Transfer (CCT)*, sebuah model yang diakui secara global dalam menangani kemiskinan kronis sebagai bagian dari penanggulangan sosial. Program ini menyediakan bantuan dana kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam rangka mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, sejak tahun 2007, pemerintah telah menjalankan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), yang lebih dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Berikut adalah skema bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) Per Tahap Penyalurannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia :

Tabel 1.1
Data Skema Bantuan PKH Tahun 2021

No	Kategori	Indeks/Tahun	Indeks/per3Bulan
1.	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
2.	Anak Usia dini	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
3.	Anak Sekolah SD	Rp. 900.000	Rp. 225.000
4.	Anak Sekolah SMP	Rp. 1. 500.000	Rp. 375.000
5.	Anak Sekolah SMA	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
6.	Lanjut Usia 70+	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
7.	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021

Bantuan keuangan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi tanggung jawab di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Tidak semua Rumah

Tangga Sangat Miskin (RTSM) dapat menjadi penerima manfaat PKH, hanya keluarga yang termasuk dalam kategori-kategori spesifik tersebut yang dianggap layak menerimanya. Program perlindungan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Miskin melalui persyaratan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang telah ditentukan khusus untuk Keluarga Sangat Miskin. Dengan penyediaan akses tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pola pengasuhan pembelajaran anak di lingkungan rumah, hasil belajar, kondisi kesehatan, serta perilaku yang berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Namun, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan penggunaan dana yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini. Banyak masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan tujuan semua, yakni untuk mengakses berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di lingkungan mereka. Akibatnya, sebagian besar dari keluarga penerima tersebut mengalokasikan dana itu untuk keperluan lain yang mereka anggap mendesak, seperti membeli pakaian sehari-hari- bahan pokok, atau bahkan melunasi hutang yang ada sambil menantikan pencairan dana PKH berikutnya. Hal ini terjadi karena dana dari program tersebut dicairkan setiap 3 bulan satu kali dalam 4 tahap selama 1 tahun. Akan tetapi sebagian KPM juga sudah mengetahui tujuan dana PKH ini yang paling utama diutamakan kepada biaya pendidikan sekolah anak.

Program Keluarga Harapan (PKH) pada awalnya dirancang dengan tujuan yang tampak sangat ideal, yakni sebagai salah satu pendekatan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang telah kronis di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan, beberapa paket kebijakan yang tercantum dalam undang-undang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu implementasi nyata dari kebijakan-kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan meneliti kebijakan ini secara mendalam guna menilai serta membuktikan efektivitasnya dalam menanggulangi kemiskinan, sebagaimana yang telah diklaim oleh pemerintah sebagai suatu keberhasilan.

Berbicara masalah kemiskinan, data mengenai warga miskin di Kalimantan Selatan masih dianggap tidak valid, karena banyak warga miskin yang belum tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai program bantuan yang disediakan pemerintah. Di lapangan, masih sering ditemui penerima bantuan sosial yang diduga tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Banyak masyarakat yang merasa gelisah dan mengeluh karena data mereka tidak terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data penerima agar bantuan dapat disalurkan kepada pihak yang tepat sasaran.

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amuntai Tengah sendiri pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah mulai dilaksanakan pada tahun 2014 dari 24 desa, dan 5 kelurahan di Kecamatan Amuntai Tengah, HSU terima bantuan sosial.

Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 Kecamatan, meliputi Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Babirik, Banjar, Danau Panggang, Haur Gading, Paminggir, Sungai Pandan, dan Sungai Tabukan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki 10 Kecamatan, Yaitu : Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, Kecamatan Banjar, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Paminggir, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Sungai Tabukan.

Kecamatan Amuntai Tengah terdiri dari 5 Kelurahan, yakni Kelurahan Murung Sari, Kelurahan Paliwara, Kelurahan Antasari, Kelurahan Kebun Sari, serta Kelurahan Sungai Malang

Kecamatan Amuntai Tengah terdiri atas 24 desa. Berikut merupakan daftar keseluruhan desanya: Hulu Pasar, Tambalangan, Tangga Ulin Hilir, Tangga Ulin Hulu, Danau Cermin, Datu Kuning, Harus, Harusan, Kandang Halang, Kembang Kuning, Kota Raden Hilir, Kota Raden Hulu, Mawar Sari, Muara Tapus, Palampitan Hilir, Palampitan Hulu, Pasar Senin, Pinang Habang, Pinang Kara, Rantawan, Sungai Baring, Sungai Karias, Tapus dan Tigarun.

Dari lima kelurahan yang ada, peneliti memutuskan kajiannya pada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Kebun Sari. Pemilihan tersebut dilakukan agar fokus permasalahan penelitian menjadi lebih tajam. Kelurahan Kebun Sari merupakan Kelurahan yang telah menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2014 hingga saat ini.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Kebun Sari yaitu maka di dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran dari KPM mengenai Tujuan awal dari PKH.

Kurangnya kesadaran dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam penggunaan dana Program keluarga Harapan (PKH) sebagaimana tujuan awal dari program tersebut. Tujuan awal dari pemberian dana PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang dimanfaatkan ke Faskes (Fasilitas Kesehatan), Fasdik (Fasilitas Pendidikan) dan Kesos (Kesejahteraan sosial), sedangkan pada kelurahan Kebun Sari terdapat masyarakat yang menganggap bantuan ini adalah bantuan gratis yang akan terus berlanjut untuk membantu perekonomian mereka dalam jangka waktu yang panjang, padahal program ini PKH ini untuk meringankan keluarga yang dianggap kurang mampu dan memenuhi syarat atau 3 komponen (Komponen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan sosial). Jadi tujuan awal PKH ini untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan adanya program ini dapat meringankan sedikit dalam perekonomian yang.

(Sumber Data : Penerima manfaat PKH Kelurahan Kebun Sari)

2. Kurang tepatnya sasaran dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kurang tepatnya sasaran dalam penerima bantuan PKH disini maksudnya disebabkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi penerima bantuan dari waktu ke waktu serta adanya kesalahan pendataan, dimana beberapa penerima sebenarnya sudah tergolong mampu tapi masih menerima bantuan dan kemudian adanya peserta baru yang masih menunggu verifikasi. Hal ini yang menyebabkan belum sepenuhnya tepat

karena melihat dari kondisi lapangan seperti kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang. (*Sumber Data : Penerima Manfaat PKH Kelurahan Kebun Sari*)

3. Pemenuhan Prioritas masyarakat dalam program PKH masih belum sepenuhnya terpenuhi. Program ini dirancang untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bantuan bersyarat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa bantuan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara menyeluruh. Fungsi PKH yang lebih sebagai penunjang untuk mengurangi beban ekonomi keluarga belum berjalan optimal. (*Sumber Data: Penerima Manfaat PKH Kelurahan Kebun Sari*)

Melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka secara sederhana penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Maka untuk mengukur Efektivitas Program tersebut difokuskan permasalahan menurut Edy Sutrisno dalam (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018: 43) adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Program
2. Ketepatan Sasaran

3. Ketepatan Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam hal Pengefektivitasan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Serta referensi bagi peneliti berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wenny Desty Febrian dkk (2020) membahas “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Nagari Tanjung Bungo berjalan cukup baik, meskipun masih ada kendala dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKH), menyebabkan beberapa masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan PKH tidak menerimanya. Hambatan lainnya adalah kurangnya pendamping yang intensif bagi peserta, sehingga dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang ditetapkan.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswanti Saragi, dkk (2021) yang membahas Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut mencakup:
 - a. Penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang telah tercatat dalam sistem Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), namun tetap melibatkan pengecekan kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementrian Sosial.
 - b. Terdapat kendala dalam pelaksanaan, terutama dalam kesulitan mengumpulkan semua peserta secara bersama-sama setiap bulan untuk melakukan pengecekan dalam pembinaan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pelayanan Publik

a. Pelayanan Publik

Pandji Santosa dalam (Suryo Sakti Hadiwijoyo & Fahima Diah Anisa, 2021: 62), “Pelayanan Publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintahan ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat”.

Suryo Sakti Hadiwijoyo & Fahima Diah Anisa (2021: 62), “Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karenanya, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional”.

2. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. *Effectiveness* erat kaitannya dengan kata *effect* dan *effective*. *Effect* berarti efek, akibat, kesan, kemandirian, dampak, dan

pengaruh. Adapun *effective* berarti efektif, manjur, ampuh, berlaku, mujarab, berpengaruh dan berhasil guna.

Barnard dalam (Daradjat Kartawidjaja, 2018:140), Keefektifan organisasi diartikan sebagai pencapaian sasaran-sasaran dari usaha kooperatif.

Etzioni dalam (Daradjat Kartawidjaja, 2018:140), “Keefektifan organisasi diukur dari sejauh mana ia mencapai tujuan dengan nilai-nilai organisasi yang ada”.

Sinambela (2017:278), “Efektivitas adalah keberhasilan yang diperoleh atas suatu program yang ditetapkan”.

Pasalong (2017:4), “Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan”.

Epstein dalam (Daradjat Kartawidjaja, 2018:141), “Ukuran keefektifan bagi suatu organisasi pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana organisasi pemerintah dapat mencapai tujuan publik yang diinginkan, memenuhi keinginan-keinginan masyarakat serta pelayanan prima”.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa efektivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat tercapai sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

b. Model-model Pengukuran Efektivitas

Robbins dalam (Khaliza, 2020:27) mengemukakan empat pendekatan dalam memandang suatu efektivitas organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*)
 2. Pendekatan sistem (*system approach*)
 3. Pendekatan konstituensi-strategis (*strategic-constituencies*)
 4. Pendekatan nilai-nilai yang bersaing (*competing values approach*).
- Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*) adalah pendekatan yang memandang bahwa sebuah organisasi (berdasarkan) diciptakan untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang telah sebelumnya.

Edy Sutrisno dalam (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018: 43) menyatakan bahwa untuk mengukur Efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut:

1. Pemahaman Program

Sejauh mana peserta atau pihak terkait memahami tujuan dan mekanisme program. Pemahaman program ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu tujuan program (1), dapat memahami program (2).

2. Ketepatan Sasaran

Program berhasil menjangkau dan memberikan manfaat kepada penerima yang seharusnya. Ketepatan sasaran terdiri menjadi beberapa faktor, yaitu Tepat sasaran (1), Prioritas masyarakat terpenuhi (komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial (2).

3. Ketepatan Waktu

Program dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal dan target waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu terdiri dari beberapa faktor, yaitu pelaksanaan/cara kerja program (1), sesuai dengan jadwal (2).

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program berhasil dicapai. Tercapainya tujuan terdiri menjadi beberapa faktor, yaitu Tingkat keberhasilan program (1), Keterwujudan (2).

5. Perubahan Nyata

Adanya dampak positif atau perubahan yang terukur dan terlihat dari pelaksanaan program. Perubahan nyata terdiri dari beberapa faktor, yaitu hasil terbukti (1), manfaat yang dirasakan (2).

3. Konsep Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Nafi'ah dalam (Mahdaliyah & Rohmah, 2024: 270), "Kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang dilihat dari kondisi awalnya memang miskin. Kemiskinan pada golongan ini dikarenakan tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan, dan mereka hanya mendapatkan pendapatan yang sangat rendah. Kemiskinan ini juga dapat disebabkan

karena mengalami cacat, sakit, usia lanjut, dan bencana alam. Dengan begitu, seringkali kemiskinan natural ini terjadi secara turun temurun”.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang malas, lemah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya diskriminasi dalam aspek-aspek tertentu.

Mubyarto dalam Arifin, 2020 sebagaimana dikutip oleh (Mahdaliyah & Rohmah, 2024: 270), “Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana dalam kehidupan penduduk tersebut merasakan serba kekurangan akibat rendahnya pendapatan yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan produktivitas, lemahnya nilai produksi, serta terbatasnya kesempatan bekerja”.

Kemiskinan adalah kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasi sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa penduduk dikategorikan miskin jika memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Batas garis kemiskinan yang diterapkan setiap negara berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi standar kebutuhan hidup.

Batasan seseorang untuk dapat dikatakan miskin perlu diketahui agar kemiskinan itu sendiri dapat diidentifikasi dan diquantifikasi jumlahnya. Kemiskinan juga menjadi elemen yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Dimana kemiskinan menjadi salah satu ukuran penting dalam pembangunan manusia/Human Development Index (HDI).

Anwas (2019:83-84), “Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak zaman dulu, kemiskinan sudah dirasakan nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan. Padahal jika melihat dari potensi sumber daya alam, kekayaan Nusantara baik didarat, laut, atau udara sangat melimpah. Kekayaan ini sejatinya bisa mensejahterakan penduduk pribumi”.

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga disebabkan lemahnya aspek moral, sosial, dan juga aspek budaya, serta kebijakan pembangunan yang belum merata. Logikanya, orang miskin umumnya pendapatan kecil dan tidak menentu. Pendapatan kecil ini disebabkan oleh kemampuan SDM-nya yang rendah, tidak memiliki modal usaha atau tidak memiliki *networking* dalam berwirausaha, Kemiskinan juga terkait dengan aspek budaya baik menyangkut individu maupun sosial. Dalam tataran pembangunan nasional, kemiskinan dapat disebabkan faktor pembangunan yang tidak merata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan pembangunan.

Edi Suharto (2017:131) “Menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan

senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai “misteri” kemiskinan ini. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia”.

Angka kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Mahda Mahdaliyah & Syifa Rohmah (2024: 270) “Melalui penetapan nilai standar kebutuhan minimum, baik kebutuhan pangan dan non pangan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari. Nilai minimum tersebut digunakan sebagai batasan untuk membedakan antara penduduk miskin dan penduduk tidak miskin (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan terbagi menjadi dua, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makan. Dengan kata lain, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki jumlah pengeluaran rata-ratanya berada di bawah garis kemiskinan”.

Karena objek kemiskinan adalah manusia sebagai makhluk sosial maka yang dikatakan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) menurut ukuran BPS terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sehingga jika hal itu diformulasikan maka $GK = GKM + GKNM$. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita

per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pagang dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah untuk pengeluaran 52 komoditi ini sekitar 70% dari total pengeluaran orang miskin. Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis di pedesaan. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) sejak 1997-1998 mengenalkan angka-angka kemiskinan dimana angka tersebut diperoleh dari menghitung atau menjumlahkan angka keluarga Pra-Keluarga Sejahtera-I (KS-1) alasan ekonomi. BKKBN menggunakan keluarga/rumah tangga sebagai dasar penentuan tingkat kemiskinan. Berbeda dengan BPJS yang menggunakan individu sebagai dasar penentuan angka kemiskinan. Dimana menurut BKKBN dalam mengukur tingkat kemiskinan pendekatan yang digunakan bukan hanya terkait dengan pendekatan materil namun juga dengan pendekatan peningkatan kesejahteraan yang menggunakan ukuran-ukuran non materil, seperti kesempatan melaksanakan ibadah. Kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan penduduk menurut Zulkifli Husin yaitu dengan menggunakan Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (RFKM).

Apabila diasumsikan kebutuhan fisik minimum sesuai dengan kondisi yang dihadapi sekarang ini. Yakni dengan menghitung biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum empat sehat lima sempurna.

b. Jenis-jenis Kemiskian

Menurut Karakteristiknya masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbataas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Chamber dalam Nasikun, dikutip dalam Adawiyah, 2020, dan jacobus et.al., 2019 sebagaimana dikutip dalam (Andina & Wahyudi, 2024: 75), “ Kemiskinan terbagi menjadi empat yaitu *kemiskinan absolut* yang terjadi karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup, *kemiskina relatif* terjadi karena pengaruh kebijakan yang belum mencapai semua lapisan masyarakat, *kemiskinan kultural* yang terjadi karena mengacu pada sikap manusia yang bermalas-malasan dan boros serta *kemiskinan struktural* terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya”.

Sumodiningrat dalam Tontoro, 2014 sebagaimana dikutip oleh (Adinda & Wahyudi, 2024: 75), “Menyatakan bahwa kemiskinan dibedakan berdasarkan kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, sedangkam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi tiga yaitu kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural serta kemiskinan kultural”.

c. Program Mengatasi Kemiskinan

Dari lapisan kelompok miskin, ada bagian yang paling bawah. Yakni, masyarakat yang termasuk miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti: rendahnya tingkat pendidikan; akses terbatas ke layanan kesehatan dan sanitasi; minimnya kesempatan kerja produktif, ketidaksetaraan gender dan keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas.

Setidaknya untuk mengentaskan kemiskinan paling dasar itu sudah mulai menuai hasil positif. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem yang didefinisikan sebagai pengeluaran di bawah Rp10.739 per hari per individu, telah menurun drastis dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah yang terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini juga menjadi indikator penting bahwa Indonesia makin mendekati target eliminasi kemiskinan ekstrem yang ditetapkan pemerintah untuk 2029.

Mulai tahun ini, berbagai program sosial dan ekonomi yang dijalankan pemerintah berperan besar untuk mencapai target eliminasi kemiskinan. Program bantuan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan subsidi listrik telah memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan melalui

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan desa telah memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus utama, dengan pelatihan keterampilan, akses permodalan mikro, dan pengembangan usaha kecil menengah yang membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin. Satu hal, pemerintah menekankan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan gotong royong nasional. Sinergi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.

Melalui strategi yang terintegrasi, data yang akurat, dan komitmen politik yang kuat, Indonesia optimistis dapat mengurai persoalan kemiskinan secara berkelanjutan, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam beleid yang diteken di Jakarta pada Kamis, 27 Maret 2025 itu, dia setidaknya menyiapkan 16 program yaitu:

1. Pada diktum ketiga, disebutkan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk optimalisasi pelaksanaan

pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.

2. Instruksi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan/atau program pemberdayaan kepada Menteri Sosial (Mensos).
3. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) serta Menteri Agama (Menag).
4. Perintah untuk menyalurkan bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dan bantuan pendidikan lainnya kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta Menag.
5. Mendorong kepesertaan keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai penerima bantuan iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Menteri Kesehatan (Menkes).
6. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa dan program padat karya di tingkat desa oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
7. Pemberian bantuan perbaikan rumah atau pembangunan rumah baru dan/atau relokasi pemukiman bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
8. Prabowo menginstruksikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk menyiapkan program pelatihan vokasi.

9. Presiden juga meminta perluasan cakupan kepesertaan program jaminan ketenagakerjaan (jamsostek) bagi pekerja/buruh tergolong miskin dan miskin ekstrem kepada Menaker.
10. Pemberian akses program pemberdayaan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
11. Pelaksanaan program perhutanan sosial oleh Menteri Kehutanan (Menhut).
12. Menyelenggarakan pelayanan program kependudukan dan pembangunan keluarga kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
13. Melaksanakan program padat karya sektor perhubungan di wilayah kantong-kantong kemiskinan kepada Menteri Perhubungan (Menhub).
14. Melakukan pemberdayaan penduduk tergolong miskin dan miskin ekstrem dalam program transmigrasi kepada Menteri Transmigrasi (Mentrans).
15. Melaksanakan program cadangan pangan pemerintah serta ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
16. Melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

(Sumber:<https://www.tempo.co/ekonomi/16-program-yang-disiapkan-prabowo-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-1232902>, diakses 31 Agustus 2025)

4. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Menurut Pasal 1 (1) Permensos No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah “Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (K. S. Indonesia, 2018)”.

Kementrian Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya di sebut PKH adalah “program pemberian bantuan sosial barsyarat kepada Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin rentan yang terdaftar dalam data terpadu program fakir miskin serta ditetapkan sebagi keluarga penerima manfaat PKH.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kesejahteraan Sosial (K. S. Indonesia, 2018), pasal 2 Pemensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH bertujuan :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

c. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”, Program Keluarga Harapan ini memfokuskan tiga kategori/komponen yaitu

1. Pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan anak (KPM)
2. Kesehatan (meningkatkan kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita)

3. Kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun)
- d. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pasal 5 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan, Kesejahteraan Sosial (K. S. Indonesia, 2018) meliputi:
1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a) Ibu hamil/menyusui
 - b) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
 2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - c) Anak sekolah menengah atas.madrasah aliyah atau sederajat
 - d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
 3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
 - b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

e. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH

Setiap penerima PKH mendapatkan hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam permensos tentang PKH. Hak penerima PKH sebagaimana diatur dalam pasal 6 Permensos tentang PKH, meliputi:

1. Bantuan Sosial PKH
2. Pendampingan PKH
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
4. Program Bantuan Komplimenter di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

Selain hak, penerima PKH juga berkewajiban untuk:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusi 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen kanjyt usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan /atau penyandang disabilitas berat.

Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen

1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Kesejahteraan sosial

Menurut pasal 8 (2) permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Komponen Kesehatan dengan ketentuan harus (K. S. Indonesia, 2018):

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas
2. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif
3. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Menurut pasal 8 (3) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Komponen pendidikan dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Menurut pasal 8 (4) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Komponen kesejahteraan dengan ketentuan harus:

1. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.
2. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

f. Mekanisme Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH)

(K. S. Indonesia, 2018) Mekanisme pelaksanaan PKH yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan menurut pasal 32 permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan yaitu:

1. Perencanaan
2. Penetapan calon peserta PKH
3. Validasi data calon penerima manfaat PKH
4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH
6. Pendampingan PKH
7. Peningkatan Kemampuan Keluarga
8. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH
9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH
10. Transformasi kepersertaan PKH

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara non tunai meliputi:

1. Pembukaan rekening penerima bantuan Bantuan Sosial PKH
2. Sosialisasi dan edukasi
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera
4. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH
5. Penarikan dan Bantuan Sosial PKH
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH.

C. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Negara-negara Berkembang, Penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu didukung dengan program yang dapat mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan atas kelompok miskin sehingga efektivitas suatu organisasi dapat tercapai. Salah satu program kemiskinan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dasar hukum dari Program Keluarga Harapan adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, melalui program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Untuk menganalisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka peneliti menggunakan teori Menurut Edy Sutrisno dalam (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018:43) yang menyatakan bahwa untuk mengukur Efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel berikut :

1. Pemahaman Program

Sejauh mana peserta atau pihak terkait memahami tujuan dan mekanisme program. Pemahaman program terdiri dari beberapa faktor, yaitu tujuan program (1), Dapat memahami program (2).

2. Ketepatan Sasaran

Program berhasil menjangkau dan memberikan manfaat kepada penerima yang seharusnya. Ketepatan sasaran terdiri menjadi beberapa faktor, yaitu Tepat sasaran (1), Prioritas masyarakat terpenuhi (komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial) (2).

3. Ketepatan Waktu

Program dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal dan target waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu terdiri dari beberapa faktor, yaitu pelaksanaan/cara kerja program (1), sesuai dengan jadwal (2).

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program berhasil dicapai. Tercapainya tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu Tingkat keberhasilan program (1), Keterwujudan (2).

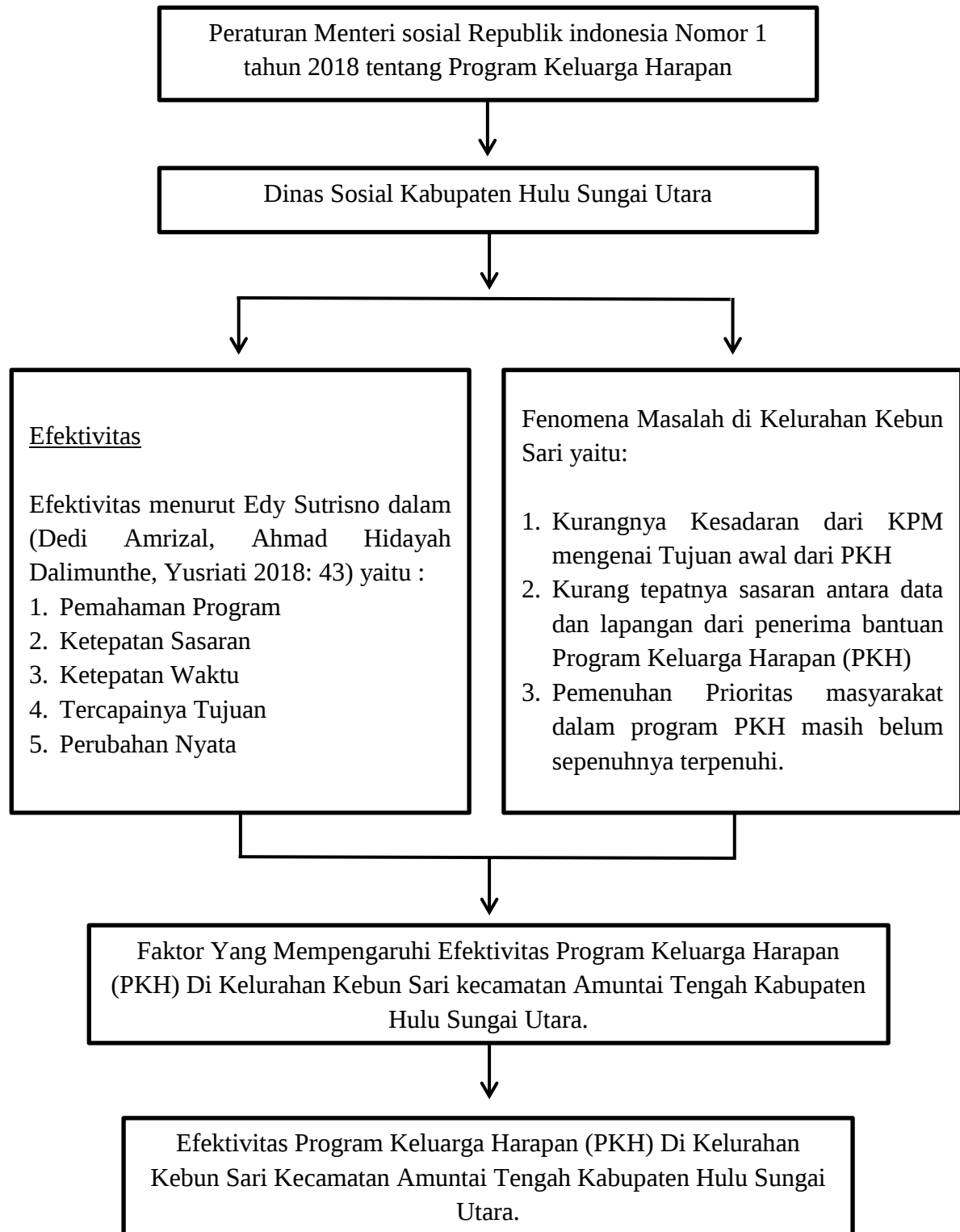
5. Perubahan Nyata

Adanya dampak positif atau perubahan yang terukur dan terlihat dari pelaksanaan program. Perubahan nyata terdiri dari beberapa faktor, yaitu hasil terbukti (1), Manfaat yang dirasakan (2).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan memberikan gambaran terhadap kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71415, dan Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71418.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Imam, 2015:82) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Sugiyono dalam (Fiantika, 2022: 82), “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.”

Fokusnya adalah menggambarkan secara menyeluruh tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Menurut Fiantika (2022:21), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.”

D. Data dan Sumber Data

Menurut sumber pengambilannya, data dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu :

1. Data

a. Data Premier

Data Premier adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) melalui para informan.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui secara mendalam mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Baik data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kegiatan, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa literatur, jurnal, peraturan, situs internet serta data pendukung yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling dalam menentukan dan menemukan informasi. Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding dan lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya.

Ujang Sumarwan (2018) “Teknik Snowball ini adalah praktek identifikasi responden yang bisa kita wawancarai di mana responden tersebut akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi orang lain yang bisa diikuti dalam studi tersebut. Terdapat beberapa kriteria dalam Snowball Sampling, di antaranya jumlah, biaya yang dibutuhkan, dan

metode statistik yang akan digunakan dalam riset. Sedangkan, faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah sampel, di mana semakin banyak jumlah sampel maka akan semakin bagus tingkat perkiraan dan semakin tinggi ketepatan dalam estimasi hasil riset.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball yang mana awalnya peneliti Cuma mengambil 10 orang informan, kemudian dengan menggunakan teknik ini maka informan yang digunakan bertambah menjadi 12 orang informan, penelitian menciptakan jumlah informan sebanyak 12 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nama-nama Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hidayatul Fikri	Koordinatorr PKH (Program Keluarga Harapan)	1 Orang
2	Arbainah	Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) Kelurahan Kebun Sari)	1 Orang
3	Rusdiana	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
4	Sery Wendari	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
5	Fatmah	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
6	Masdiah	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
7	Parmiati	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
8	Sanainah	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang

9	Muzalifah	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
10	Willy Warni	Mayarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
11	Nurlina	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
12	Sariati	Masyarakat Penerima PKH di Kelurahan Kebun Sari	1 Orang
Jumlah			12 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara , maka direncanakan desain operasai penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep.

Edy Sutrisno dalam (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018:43), menyatakan bahwa untuk mengukur Efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabe - variabel verikut:

1. Pemahaman Program
2. Ketepatan Sasaran
3. Ketepatan Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan memaparkan teori yang digunakan ke dalam desain operasional penelitian yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang membantu penelitian dalam pengumpulan data. Dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.2
Desain Operasional Pendelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Efektivitas menurut Edy Sutrisno dalam (Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati 2018: 43)	Pemahaman Program	1. Tujuan Program 2. Dapat memahami program
	Ketepatan Sasaran	1. Tepat Sasaran 2. Prioritas Masyarakat Terpenuhi
	Ketepatan Waktu	1. Pelaksanaan/cara kerja program 2. Sesuai Jadwal
	Tercapainya Tujuan	1. Tingkat Keberhasilan Program 2. Keterwujudam
	Perubahan Nyata	1. Hasil Terbukti 2. Manfaat yang dirasakan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Observasi

Observasi, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat setiap informasi sesuai dengan kenyataan yang dialami selama penelitian berlangsung. Pengalaman peneliti tersebut dapat terjadi berdasarkan melihat, mendengar, dan merasakan yang kemudian dilaporkan se subjektif mungkin.

Ni'matuzzahroh & Susanti Prasetyaningrum (2018:1), "Pada umumnya orang mengasosiasikan observasi dengan melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek. Bahkan begitu dekatnya kata-kata observasi dengan manusia, aktivitas dengan orang lain baik disadari atau

tidak. Jal ini dilakukan seseorang untuk mampu merespon stimulasi atau informasi yang ada di hadapannya dengan tepat”.

Fiantika (2022: 21), “Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi”.

2. Wawancara

Wawancara, yang peneliti maksud disini adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau memberikan pertanyaan kepada responden secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dan segala pertanyaan difokuskan pada permasalahan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang di peroleh sebelumnya.

Fiantika (2022: 13), “Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, sedangkan dokumentasi yang peneliti maksud melakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui sumber-sumber data yang dianggap relevan, baik berupa rekaman baik melalui makalah, buku-buku, surat-surat, maupun sumber informasi lain seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Fiantika (2022: 14), “Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan.

Vivi Candra et.al. (2021;122) “Dokumentasi Memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, seperti alamat, latar belakang pendidikan, dan sebagainya”.

Utari (Vivi Candra et.al, 2021:122) Mengungkapkan bahwa kelebihan dan kekurangan dalam metode dokumentasi. Keunggulan dari instrumen penelitian menggunakan metode dokumentasi, antara lain:

1. Memberikan gambaran informasi tentang informasi pada waktu lampau berupa rekaman atau dokumentasi lainnya.
2. Dapat merekam berbagai jenis data tentang responden seperti identitas diri responden, identitas orang tua responden, keadaan dan latar belakang keluarga responden, data psikis, prestasi belajar, lingkungan sosial, data pendidikan, data kesehatan, data psikis, prestasi belajar, dan sebagainya.
3. Menyajikan informasi mengenai hubungan antara informasi pada masa lampau dengan kondisi saat ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Melalui teknik analisa data, maka data-data yang diperoleh diklasifikasi secara diskriptif. Data-data yang telah disusun kemudian disajikan melalui proses yang dilskuism secara sistematis, metodeologis dan konsisten, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Efektivitas

Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Samiaji Sarosa (2021:3), mengatakan “Menganalisis data Kualitatif tidak mudah. Di satu sisi penelitian kualitatif berdifat subjektif, tetapi di sisi lain peneliti dituntut mempertahankan kualitas penelitiannya. Untuk itu dibutuhkan metode analisis data kualitatif yang dapat dipertanggungjawabkan kualitas akademisnya”.

Berikut ini tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data:

1. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
2. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan
3. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut disukung oleh data yang telah disimpulkan dan dianalisis.

H. Uji Kredibilitas Data

Sugiyono (2017:270), Bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Penelitian mengambil beberapa antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negatif, dan membercheck.

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kapasitas

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Ketekunan dalam penelitian sangat diperlukan, tekun dalam menganalisis kasus, observasi lapangan maupun terjun langsung ke lapangan agar mengetahui apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Terkadang kita perlu ekstra dalam meneliti permasalahan yang harus diselesaikan dengan tempo pendek maupun panjang, tergantung kita melakukannya dalam ketekunan seperti apa yang harus dilakukan.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu, karena data itu harus sesuai dengan sumber yang di dapat, jadi dapat mengetahui data yang seperti apa yang harus dicari dan sumber dari mana data itu di dapat.

Triangulasi sumber, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari berbagai data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

Triangulasi teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik penelitian yang berbeda, seperti dengan melakukan observasi, wawancara dan komunikasi.

Triangulasi waktu, Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan Referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penelitian. Selain itu pula referensi sangat membantu dalam pembuatan penelitian ini bukan hanya data saja melainkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam penelitian tersebut. Namun harus peka terhadap referensi yang ada, agar tidak mendapatkan referensi yang *hoax*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan referensi berupa rekaman pada saat wawancara dan data-data yang peneliti temukan pada saat penelitian

4. Melakukan *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila yang ditemukan peneliti berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2018. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Anwas. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Volume 9, Nomer 1.
- Candra, Vivi. 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, Yusriati. 2018, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Febrian, W. D., dkk. (2020). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Tanjung Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota*. Artikel.Tersedia:https://www.researchgate.net/publication/350070456_EVALUASI_PELAKSANAAN_PROGRAM_KELUARGA_HARAPAN_PKH_DI_NAGARI_TANJUANG_BUNGO_KECAMATAN_SULIKI_KABUPATEN_LIMAPULUH_KOTA.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatra Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2021). *Pelayanan Publik*. Rajawali Pers.
- Hery. 2018. *Soal-Jawab Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Grasindo.
- Indonesia.go.id - Mengurai Kemiskinan dengan Pemerataan dan Genjot Kualitas SDM. Tersedia:<https://share.google/oTXkSxPgD0GiTluqI>.
- Indonesia, K. S. (2018). *Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*

Kartawidjaja, D. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Khaliza, S. (2020). *Efektivitas Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sejahtera Kota Tanjungbalai*. Skripsi Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumatera Utara : tidak diterbitkan. Tersedian: <https://123dok.com/document/zgw428x6-efektivitas-kelurahan-meningkatkan-pembayaran-bangunan-kelurahan-sejahtera-tanjungbalai.html>

Mahdaliyah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, Volume 3, Nomor 2.

Ni'matuzzahroh & Susanti Prasetyaningrum. 2018. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikolog*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Pasalong, Harbani. 2017. *Teori Administtrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Rahmadana, Muhammad Fikri et. Al. 2020. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Revida, Erika et. al. 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Saputra, A. (2023). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Sungai Malang)* (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai).

Saragi, S., dkk. (2021). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak*. (PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Tarauna Gorontalo, Volume VIII, Nomor 1, 2021) Tersedia: <https://media.neliti.com/media/publications/524450-none-969884dc.pdf>.

Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

Sinambela, Lijan Poltak. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung Rafita Aditama.

Tawakkal, George Towwar Ikbil. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: IPB Press.